



“Refleksi Reforma Agraria dalam Capaian dan Tantangan GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia”



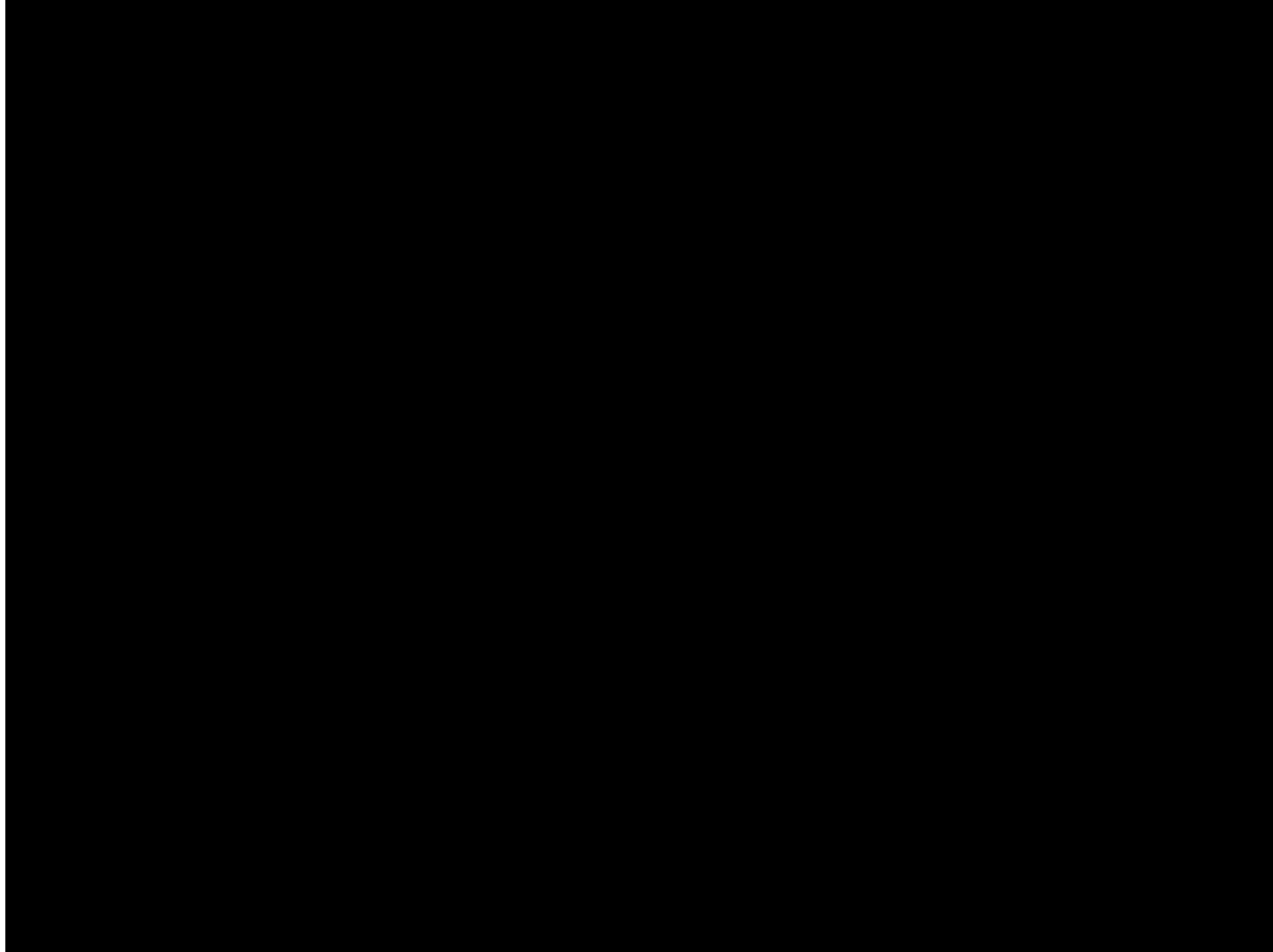
Jakarta, 10 Agustus 2023

**DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL**





ARAHAN PRESIDEN RI PADA GTRA SUMMIT 2022

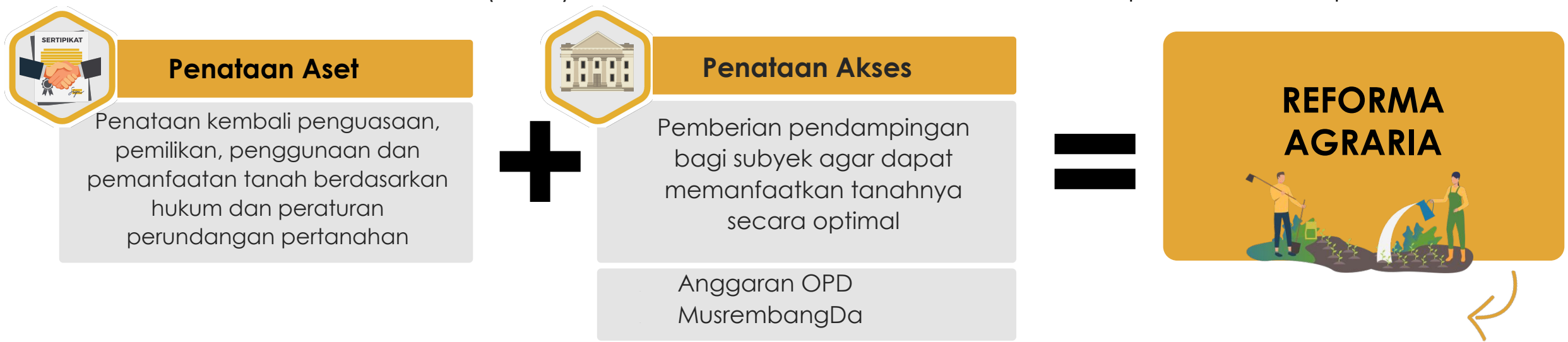




“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA Summit ini, kita harapkan GTRA segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di masyarakat agar sengketa-sengketa lahan dapat kita selesaikan”

GTRA Summit Wakatobi, 9 Juni 2022

Reforma Agraria : Penataan Kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, UU 5/1960 (UUPA), TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, UU 17/2007, Perpres 18/2020, Perpres 86/2018



Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



CAPAIAN REFORMA AGRARIA SAMPAI 7 AGUSTUS 2023



Reforma Agraria

Tanah Obyek Reforma Agraria

01	Legalisasi Aset 4.5 Juta Ha	02	Redistribusi Tanah 4.5 Juta Ha
<p>Tanah Transmigrasi Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi Target: 0.6 Juta Hektar</p>	<p>Pendaftaran Tanah/PTSL Pensertipikatan tanah masyarakat secara sistematis Target 3.9 Juta Ha</p>	<p>Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya Redistribusi Tanah Negara dari HGU habis tidak diperpanjang, tanah terlantar dan TN lainnya Target 0.4 Juta Ha</p>	<p>Pelepasan Kawasan Hutan Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA Target 4.1 Juta Ha Sudah menjadi APL: 1.665.474 ha a. Sudah Sertipikat: 351.367,08 ha b. Potensi Objek Redis: 572.777,73 ha c. Perlu Analisis lanjutan: 743.963,71 ha</p>
<p>Capaian: 207.216 bidang seluas 138.834,72 ha* (23,14%)</p>	<p>Capaian: 30.961.283 Bidang seluas 9.173.953 ha** (235,23%)</p>	<p>Capaian: 2.092.757 bidang, Seluas 1.343.151,51 ha*** (335,79%)</p>	<p>Capaian: 730.202 bidang Seluas 351.367,08 ha*** (8,57%)</p>

TOTAL Legalisasi Aset seluas 9.312.787,72 Ha (206,95%)

Catatan: Skema RA RPJMN 2015-2019 tetap dilanjutkan pada RPJMN 2020-2024

Sumber data: 1. (*) Data Realisasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Update 25 Mei 2023

2. (**) Data Pendaftaran Tanah/PTSL 17 Juni 2023

3. (***) Data Redistribusi Tanah <https://penataanagraria.atrbpn.go.id/Reforma#> accessed 6 Agustus 2023

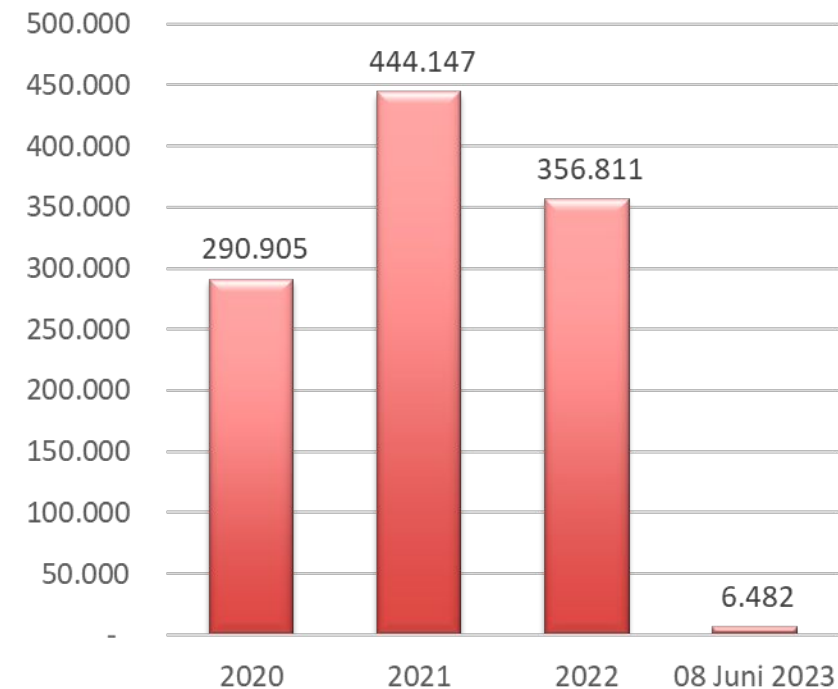
CAPAIAN REDISTRIBUSI TANAH S/D 15 JUNI TAHUN 2023

1961-2014
(53 Tahun)

Luas: 2.424.400 Hektare
Jumlah Bidang: 2.795.426 Bidang
Rata-Rata Luas/Tahun: 45.743,39 Hektare/Tahun
Rata-Rata Jumlah Bidang/Tahun: 52.744 Bidang/Tahun

2015-2023
(8 Tahun)

Luas: 1.679.707,28 Hektare
Jumlah Bidang: 2.790.925 Bidang
Rata-Rata Luas/Tahun: 239.958,18 Hektare/Tahun
Rata-Rata Jumlah Bidang/Tahun: 398.703,57 Bidang/Tahun



*Capaian Kegiatan Sertipikasi Redistribusi Tanah
Tahun 2020-2023 (Satuan Sertipikat)*

Total

Luas Redistribusi Tanah Tahun 1961 – 2023 adalah 4.104.107,28 Hektare

Jumlah Bidang Redistribusi Tanah Tahun 1961 – 2023 adalah 5.586.351 Bidang



@atr_bpn



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional



@kementerian.atrbpn

Ekonomi Pertanahan

- Berdampak terhadap pertambahan nilai ekonomi (Economic Value Added). Terbukti sejak dilaksanakan Program PTSL tahun 2017-2022, telah terjadi **pertambahan nilai ekonomi sebesar ± Rp.5.219 Triliun** hasil penerimaan pendapatan dari PBB, BPHTB, Hak Tanggungan dll

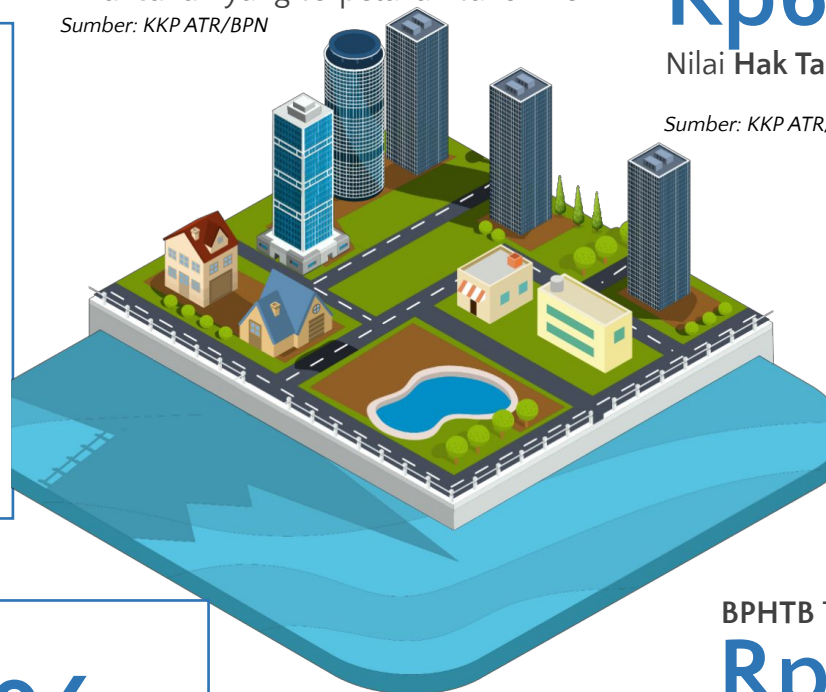
Kepastian Hukum dan Pembangunan Ekonomi

- Sertifikat tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tanah. **Setiap penerbitan atau penambahan 1 (satu) sertifikat tanah per km²**, akan meningkatkan nilai tanah mendekati **Rp900.000,00**.
- Peningkatan **1% nilai tanah** berkontribusi pada **peningkatan PDRB per kapita** di level **0,8%**

16%
Peningkatan pendapatan per kapita 22.304 penerima reforma agraria pada tahun 2021
Sumber: LAKIP ATR/BPN 2021

Rp108.856T

Nilai Tanah yang Terpetakan Tahun 2021
Sumber: KKP ATR/BPN



Rp628T

Nilai Hak Tanggungan Atas Tanah Tahun 2021
Sumber: KKP ATR/BPN

PPh Tahun 2021

Rp12,2T

Kontribusi PPh dari layanan pertanahan pada 2021 mencapai Rp12 M
Sumber: LAKIP ATR/BPN 2021

BPHTB Tahun 2021

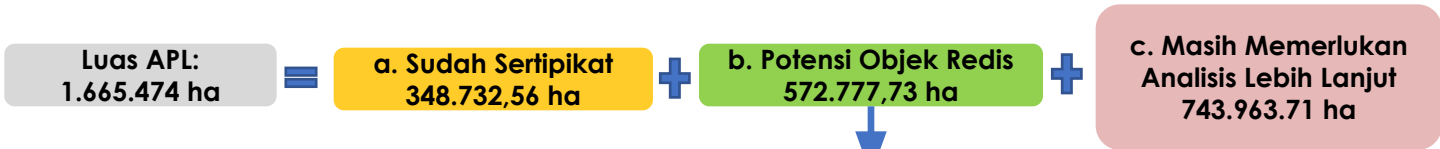
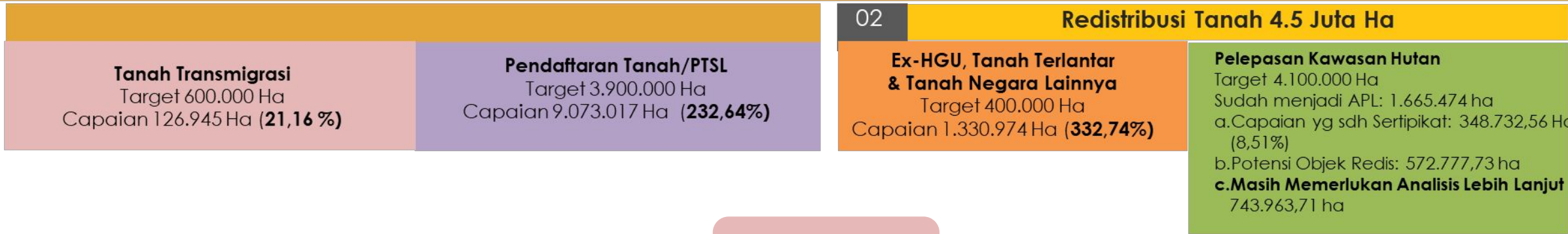
Rp19,6T

Transaksi pertanahan menghasilkan Rp20 T BPHTB sebagai retribusi dan/atau pajak daerah, yang berguna dalam menambah PAD dan sumber pembiayaan pembangunan di daerah
Sumber: LAKIP ATR/BPN 2021

Nilai Jual Beli Tanah

Rp371,9 Kuantiliun

Sumber: KKP ATR/BPN



I. TORA PKH yang potensi objek redistribusi		
A	Direncanakan redistribusi tanah Tahun 2023 dan dalam proses Analisa fisik dan yuridis	123.767,92 ha
B	Objek dari alokasi 20% PKH yang menunggu CPCL dan proses verifikasi lokasi pemenuhan kewajiban perusahaan	56.955,48 ha
C	Perlu dilakukan DIP4T/verifikasi lapang	392.054,33 ha
TOTAL		572.777,73 ha

- Tipologi TORA PKH yang memerlukan analisis lebih lanjut:**
- M1: Kondisi fisik tanah tidak mendukung : 45.933,09 ha
 - M2: Berada di atas badan air : 7.044,63 ha
 - M3: Terdapat sengketa/konflik : 555,07 ha
 - M4: Subjek tidak sesuai kriteria : 7.674,97 ha
 - M5: Penggunaannya fasos dan fasum : 3.515,04 ha
 - M6: Overlap dan peta indikatif (PIPIB) atau izin Usaha: 245.409,87 ha
 - M7: Terdapat HGU yang melebihi ketentuan pada TORA PKH kategori alokasi 20% PKH untuk perkebunan : 4.355,41 ha
 - M8: Permasalahan lainnya: 429.475,63 ha



Revitalisasi Peran Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria



Tim RAN

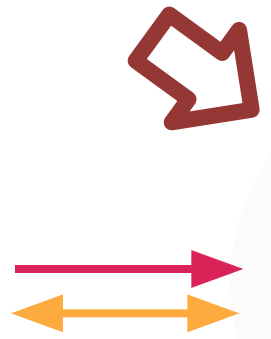
Ketua:
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



GTRA Pusat

Ketua:
Menteri ATR/Kepala BPN



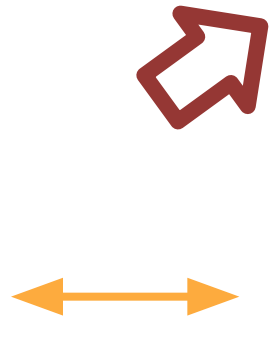
GTRA Provinsi

Ketua:
Gubernur



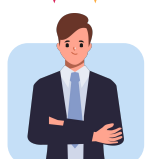
GTRA Kab/Kota

Ketua:
Bupati/Walikota



**Tim PLH
GTRA Pusat**

Ketua Pelaksana Harian:
Dirjen Penataan Agraria,
Kementerian ATR/BPN



**Tim PLH
GTRA Provinsi**

Ketua Pelaksana Harian:
Kepala Kantor Wilayah BPN



**Tim PLH
GTRA Kab/Kota**

Ketua Pelaksana Harian:
Kepala Kantor Pertanahan

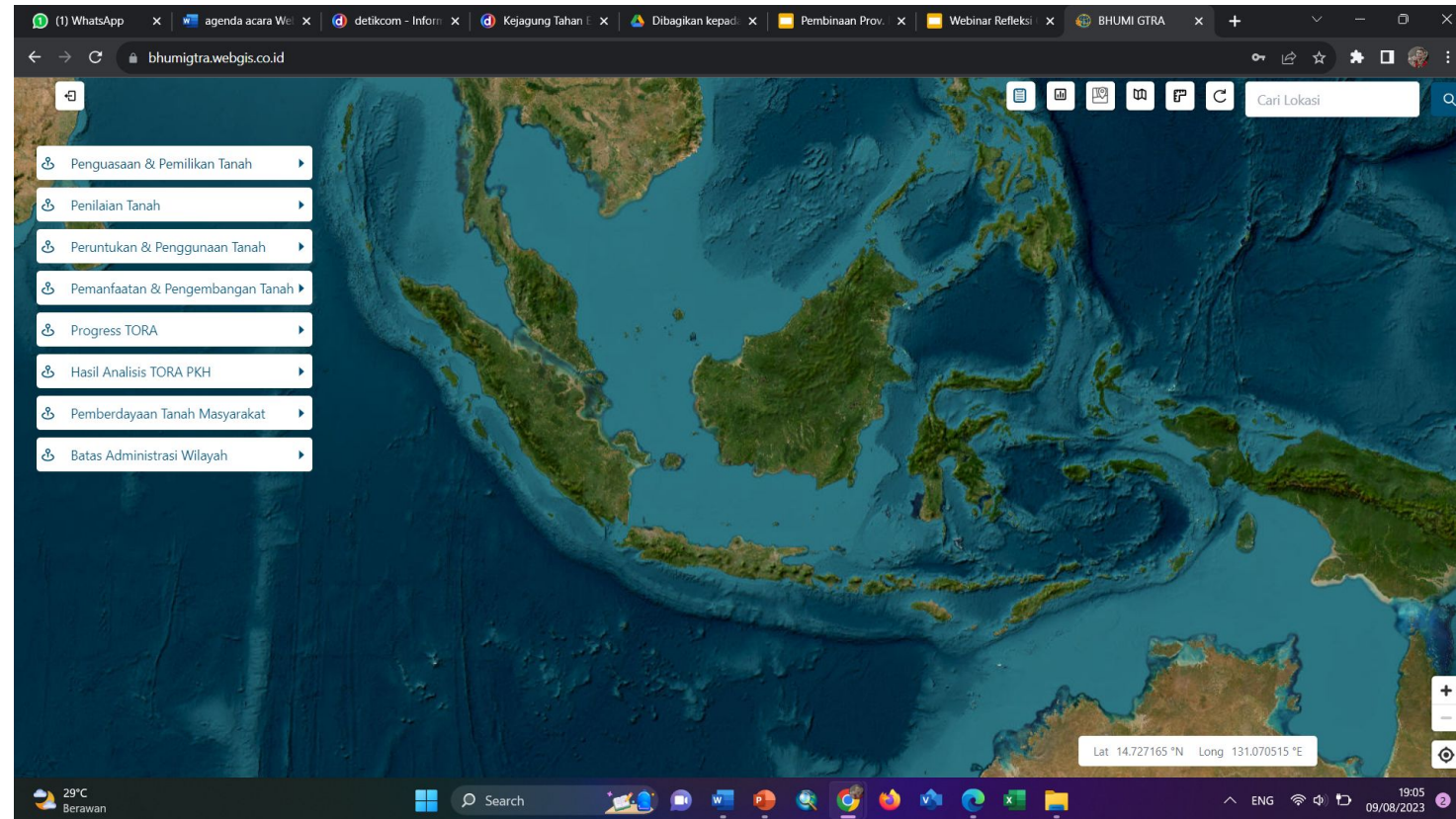


— Garis Komando/Pembinaan
— Garis Koordinasi

Bhumi GTRA - Integrasi Penataan Aset dan Akses Sebagai Tool bagi Forum GTRA dalam Mengambil Kebijakan



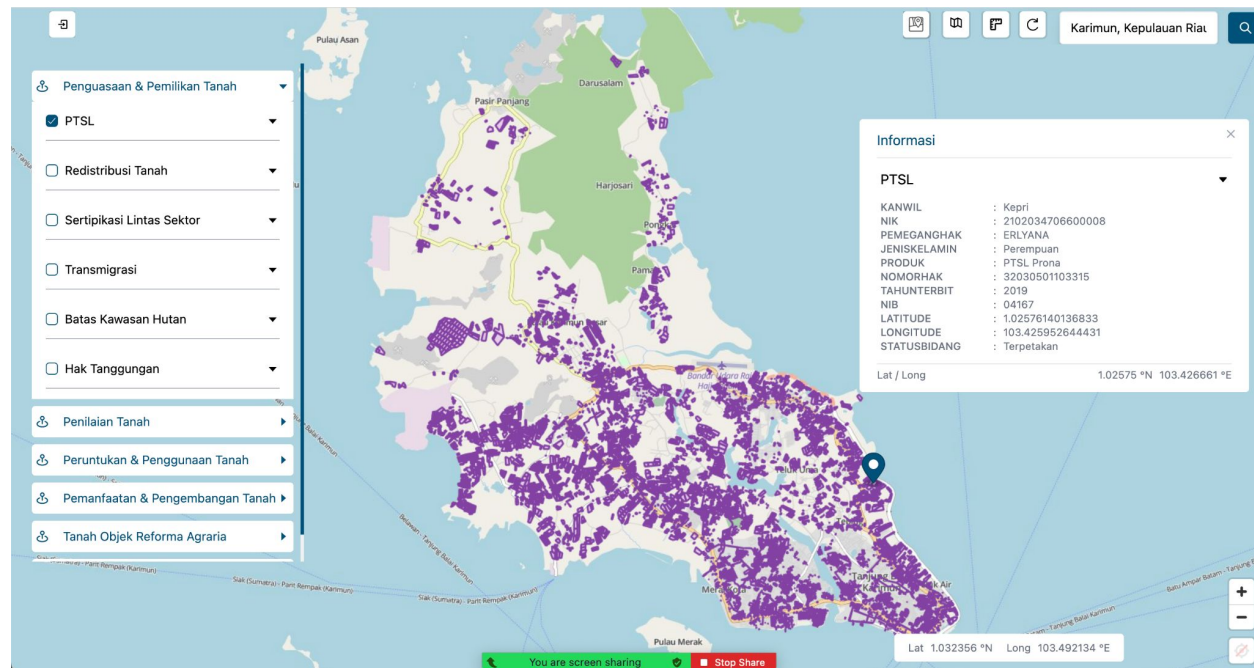
- Penguasaan & Pemilikan Tanah
 - PTSL
 - Redistribusi Tanah
 - Sertipikasi Lintas Sektor
 - Transmigrasi
 - Batas Kawasan Hutan
 - Hak Tanggungan
- Penilaian Tanah
 - BPHTB
 - PPH
 - Zona Nilai Tanah
- Sebaran Transaksi



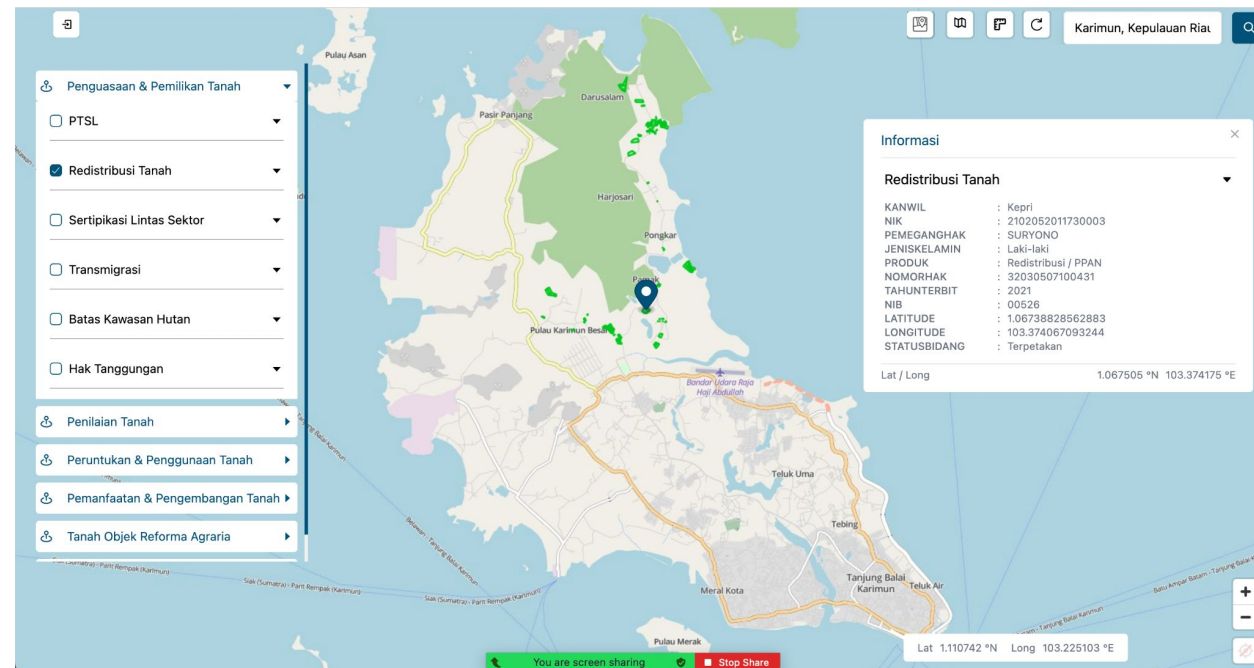
- Peruntukan & Penggunaan Tanah
 - RDTR
 - RTRW
- Pemanfaatan & Pengembangan Tanah
 - KKPR
 - PTP
 - Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Tanah Objek Reforma Agraria
 - 37 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)
 - HGU Yang Habis
- Pemberdayaan Tanah Masyarakat
 - Pemetaan Sosial Sleman
 - Pemetaan Sosial Malang

**Link Akses : <https://bhumi.gtra.webgis.co.id>
(Masih bersifat Internal Kementerian ATR/BPN)**

CONTOH PETA SEBARAN PENATAAN ASET

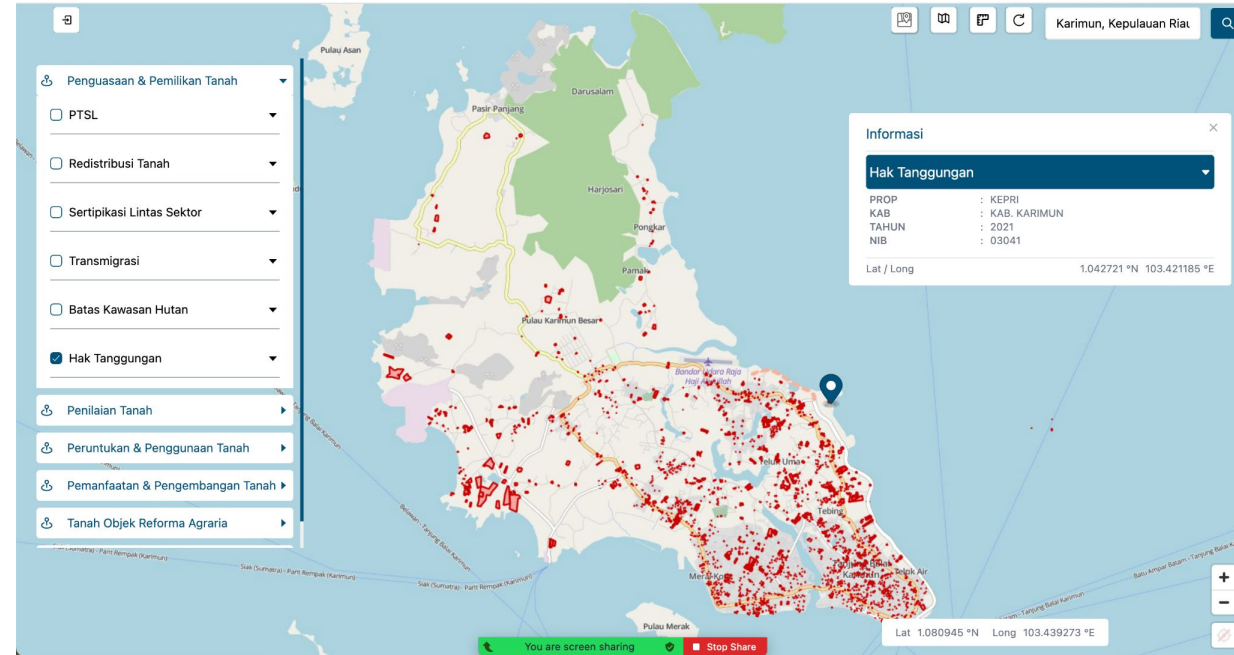


Sebaran PTSL di Kabupaten Karimun

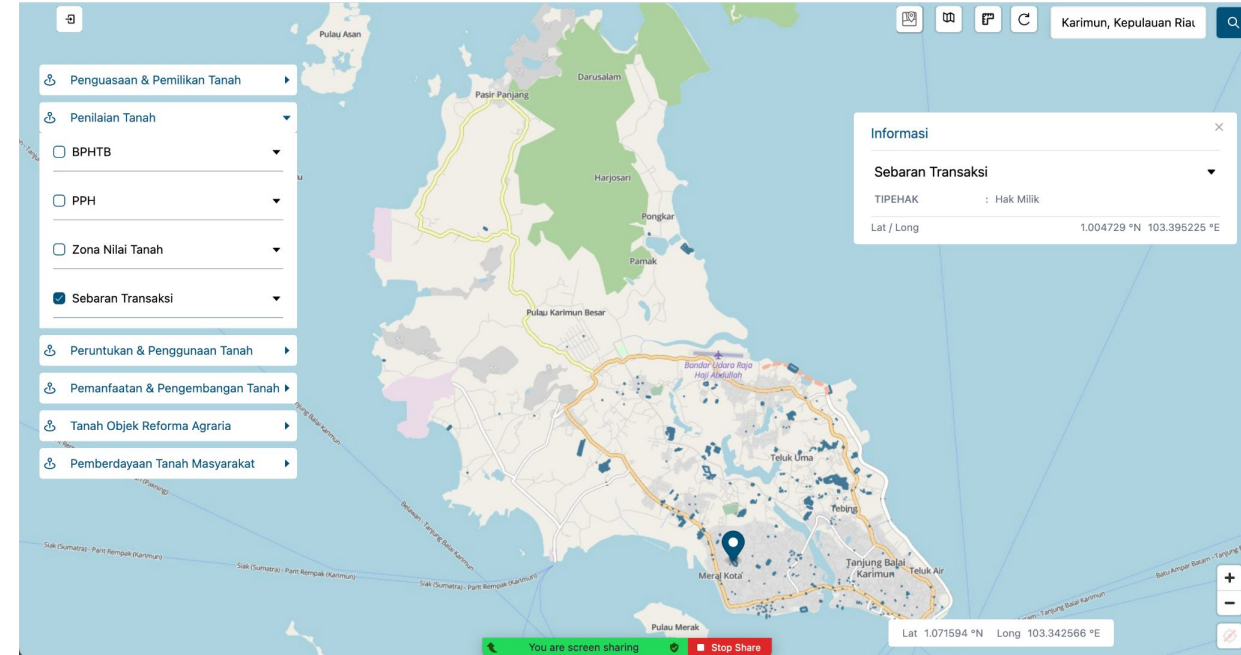


Sebaran Redistribusi di Kabupaten Karimun

CONTOH PETA SEBARAN PENATAAN AKSES



Sebaran Hak Tanggungan di Kabupaten Karimun



Sebaran Transaksi di Kabupaten Karimun



GTRA SUMMIT KARIMUN 2023 UNTUK MENJAWAB TANTANGAN REFORMA AGRARIA



ATR/BPN
MAJU DAN MODERN

“Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat”

Sub Tema :

1

Penguatan Skema Legalisasi Aset
Permukiman di atas Air, Pulau -
Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar

2

Resolusi Penyelesaian
"Legal vs Legitimate"

BMN, BUMN/BUMD, Kawasan Hutan,
Pertambangan
vs
Penguasaan Masyarakat

3

Arah Kebijakan Penyelesaian
Permasalahan Tanah Transmigrasi

4

Percepatan Redistribusi Tanah dari
Pelepasan Kawasan Hutan



**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
PERKUAT KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DRAFT
DEKLARASI GTRA SUMMIT 2023 YANG LEBIH APLIKATIF**



**SOSIALISASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TALI
PEGAS "DIGITALISASI PEMETAAN DAN PEMBANGUNAN
GEODATABASE" SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN
TANAH TRANSMIGRASI DI INDONESIA**

KOORDINASI DAN KOLABORASI STAKEHOLDER



**PELAKSANAAN FGD PERUMUSAN REKOMENDASI
PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH DARI TORA
PELEPASAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA RAPAT
KOORDINASI GTRA SUMMIT ROAD TO KARIMUN 2023**

Melayani, Profesional, Terpercaya [@ditjen_pentag](#) [@mediapentag](#) [ditjenpenataanagraria](#) Media Ditjen Penataan Agraria





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL



@atr_bpn



@KementerianATRBP



@kementerian.atrbpn



@Kementerian ATRBP